

PERAN UNI EROPA DALAM DEMOKRATISASI DI REPUBLIK CEKO PASCA REVOLUSI BELUDRU (2000-2007)

Satria Whisnu Murti

Muharjono

Jurusan Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta

Email: murti.whisnu@gmail.com

Muharjono.msi@gmail.com

Abstract

The European Union is an International Governmental Organization that has power to regulate and guide the member countries and has a role as an instrument, arena and actor. That power is channeled through international agreements and technical assistance principled democracy. The expansion of EU influence in the Central European region began in the 1990s. In 1993 the Czech Republic and Slovakia split off, this phenomenon is called the Velvet Revolution. This revolution marked the collapse of the communist regime's influence in the Czech Republic. Vaclav Havel as the first president of the Czech Republic decided to reform the country become more democratic. In early 2000 the EU channel values and principles of democracy in the Czech Republic through the Copenhagen Criteria and the Europe Agreement as well as support the implementation of this agreement through the financial assistance program, called Phare Program and the Special Accession Program for Agricultural and Rural Developments. The European Union is an actor who played an important role in the process of change in the Czech Republic towards democracy.

Key words: *European Union, Czech Republic, Vaclav Havel, Central Europe, Velvet Revolution, Phare Program, Copenhagen Criteria, Europe Agreements.*

Pendahuluan

Eropa merupakan suatu kawasan yang diperhitungkan di mata dunia internasional, dikarenakan oleh tingkat teknologi dan kemajuan peradaban yang relatif cepat dibandingkan dengan kawasan lainnya.

Eropa membentuk kerjasama regional dengan mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Sejalan dengan perkembangan zaman, komitmen para anggota MEE dan proses yang panjang dibentuklah suatu organisasi yang disebut Uni Eropa (UE). Organisasi Uni Eropa ini tidak hanya memfokuskan dirinya dalam hal pengembangan ekonomi saja melainkan mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi.

Republik Ceko adalah salah satu negara yang baru bergabung dengan Uni Eropa secara legal pada tanggal 1 Mei 2004. Republik Ceko dahulunya merupakan negara pecahan dari Cekoslovakia pada tahun 1993. Republik Ceko banyak mendapat

pengaruh dan dorongan dari Uni Eropa untuk menjadi negara yang demokratis. Uni Eropa memiliki legalitas dan *power* untuk membentuk arah kebijakan politik suatu negara di kawasan Eropa termasuk Republik Ceko.

Latar Belakang Masalah

Uni Eropa merupakan suatu organisasi regional yang berawal dari pembentukan ECSC (*European Coal and Steel Community*) pada tahun 1951 dan mulai berlaku tahun 1952

yang ditanda tangani oleh Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Luksemburg dan Perancis. ECSC kemudian berkembang menjadi *European Atomic Energy Community* (EURATOM) dan pada tahun 1957 berdasarkan Traktat Roma dibentuk *The European Economic Community* (ECC). Langkah berikutnya pada tahun 1967 adalah penggabungan ketiga institusi ECSC, EURATOM, dan ECC menjadi *European Community* (EC), kemudian pada tahun 1992 Uni Eropa dibentuk berdasarkan *Maastricht Treaty* (Adisusilo 2006:22). Selanjutnya untuk mendukung transformasi negara-negara di kawasan Eropa Tengah seperti Republik Ceko, Uni Eropa memberikan media untuk menyalurkan ide-ide demokrasi. Melalui perjanjian dan negosiasi, Uni Eropa menyalurkan pengetahuan mengenai demokrasi yang mana sebagai bentuk persuasif dalam rangka transformasi.

Salah satu bentuk perjanjiannya ialah *Europe Agreements*¹ yang mengandung supremasi hukum, hak-hak fundamental dan liberalisasi ekonomi. Kriteria Kopenhagen yang terbentuk pada tahun 1993 ini secara singkat menjelaskan standar anggota Uni Eropa dan memaparkan tiga pokok syarat keanggotaan yaitu di bidang politik, ekonomi dan *acquis communautaire* yaitu hukum Uni Eropa yang mencakup perjanjian, Undang-Undang Uni Eropa, dan Hak-Hak Dasar (<http://www.cyelp.com>).

Strategi perluasan Uni Eropa yaitu berupa pemberian bantuan dana dalam proses aksesi calon negara anggota. Bentuk strategi perluasan Uni Eropa ialah dengan *Phare Programme European Union* dan *Special for Agricultural*

and Rural Development (SAPARD). SAPARD dan *Phare Program* Uni Eropa adalah program pemberian bantuan dana yang bersifat hibah bukan pinjaman dari Uni Eropa kepada negara-negara yang sedang dalam proses aksesi (<http://www.nbs.sk>). Program ini khusus dilaksanakan di negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Tujuan Uni Eropa mengadakan program tersebut untuk mendorong terjadinya liberalisasi ekonomi dan perubahan bentuk institusi pemerintahan calon negara anggota agar sesuai dengan standar dalam Kriteria Kopenhagen yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Negara di kawasan Eropa Tengah meliputi Polandia, Hungaria, Slovenia, Republik Ceko dan Slovakia. Uni Eropa menfokuskan perluasannya ke Republik Ceko. Dengan adanya inisiatif oleh presiden Republik Ceko Vaclav Klaus sejak 1990an dalam perubahan bangsa ke arah demokrasi, Uni Eropa memulai pengaruhnya di negara tersebut. Puncaknya terjadi pada pasca Revolusi Beludru. Revolusi Beludru yang terjadi pada tahun 1990 merupakan bentuk aspirasi rakyat Cekoslovakia untuk memisahkan diri. Latar belakang Revolusi Beludru di Cekoslovakia ialah pertentangan antara kaum Ceko yang tumbuh atas dasar peradaban Austria-Jerman dan antara kaum Slovakia yang tumbuh atas dasar peradaban bangsa Magyar atau Hungari (Kavan 1992:40-42). Kaum Ceko ialah kaum yang bersifat serius, tenang dan pekerja keras dan kaum Slovakia ialah kaum yang bersifat santai, periang dan religius, selain itu perbedaan agama yaitu mayoritas Protestan oleh Ceko dan mayoritas Katolik Slovakia. Setelah terjadinya jejak pendapat untuk memisahkan diri, terbentuk negara independen Republik Ceko dan Slovakia. Perlu diketahui bahwa proses pemisahan Cekoslovakia berlangsung secara damai.

¹ *Europe Agreements* adalah perjanjian internasional yang dibentuk oleh Uni Eropa pada tahun 1993 yang bertujuan untuk merangkul setiap calon negara anggota dalam membentuk hubungan bilateral di bidang perdagangan, dan sebagai landasan persiapan keanggotaan Uni Eropa. Diakses dari, "Association Agreements", <http://eeas.europa.eu/association/>, pada 2 Juli 2015.

Pembentukan bangsa yang berprinsip demokrasi ini bertujuan agar menghapus sepenuhnya kebiasaan atau budaya komunis (non-demokrasi). Dengan bergabungnya Republik Ceko ke Uni Eropa akan mempermudah terjalinya kerjasama di kawasan Eropa dalam berbagai bidang. Secara singkat Republik Ceko bergabung pada 13 Desember 2002 dalam *Treaty of Accession* yang mulai berlaku pada tanggal 16 April 2003 dan secara legal bergabung sebagai anggota Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Proses aksesi Republik Ceko berlangsung secara demokratis dan damai.

Peran Uni Eropa Sebagai Instrumen

Uni Eropa sebagai organisasi internasional memainkan peran penting dalam demokratisasi di Republik Ceko. Peran Uni Eropa sebagai instrumen terwujud dalam perjanjian-perjanjian seperti *Europe Agreements* yang mengarah pada bidang perdagangan, hubungan bilateral, dan wadah dialog politik.

Pada Desember tahun 2000 dan Mei 2001 Komite Parlemen yang terdiri dari perwakilan Republik Ceko dan Parlemen Eropa mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan dari penerapan *Europe Agreement* yang berdampak pada peningkatan hubungan perdagangan terlihat dalam peningkatan Ekspor Uni Eropa ke Republik Ceko sebesar €18,4 juta di tahun 1999 menjadi €23,8 juta di tahun 2000 dan impor Uni Eropa dari Republik Ceko sebesar €16,8 juta meningkat menjadi €21,4 juta (Toskova 2001:32).

Selanjutnya, *Copenhagen Criteria* memiliki tiga kriteria utama yaitu: kriteria politik, kriteria ekonomi dan kriteria *acquis*. Pengaruh aksesi Uni Eropa terhadap Republik Ceko terlihat pada keharmonisan antara pemerintahan Vaclav Klaus (CSSD) dan partai oposisi (ODS) yang ditandai dengan persetujuan *Opposition Agreement* ditahun 2000 berisikan kesepakatan

pembangunan lingkungan politik yang stabil di Republik Ceko.

Dalam protokol nomor 12 *The European Convention The Protection Of Human Rights and Fundamental Freedom* dinyatakan bahwa melarang segala bentuk diskriminasi, sehingga Republik Ceko terinspirasi membuat UU baru tentang Hak Minoritas Nasional pada bulan Februari 2000. Parlemen menyetujui undang-undang tersebut pada bulan Desember tahun 2000, dimana undang-undang tersebut memungkinkan korban diskriminasi untuk mengajukan keluhan pada pemerintah. Pemerintah Republik Ceko mengadopsi kebijakan Uni Eropa dan menerapkan pada UU Hak Minoritas Nasional (<https://ec.europa.eu>).

Peran Uni Eropa Sebagai Arena

Peran Uni Eropa sebagai arena terlihat pada proses konsultasi yang diberikan Uni Eropa kepada Republik Ceko dalam rangka desentralisasi.

. Pada tahun 1997 Komisi Uni Eropa membentuk forum diskusi yang disebut *Formation of Regions Forum* yang mendiskusikan Undang-Undang yang mengatur pembagian wilayah daerah dan sistem pemilihan pemerintahan daerah. Berdasarkan forum tersebut, kesepakatan mengenai reformasi daerah akhirnya tercapai antara pihak pemerintah dan Demokrat Sosial pada Oktober 1997, dengan menghasilkan *Constitutional Act on the Formation of the Regions* (<https://www.mir.gov.pl>) membagi Republik Ceko ke dalam 14 wilayah daerah (lihat gambar).



Pada Januari tahun 2000 Undang-Undang tersebut belum dapat diaplikasikan, penundaan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam hal porsi partai politik dalam kursi dewan daerah di Republik Ceko. Namun persetujuan Republik Ceko dalam memenuhi *Copenhagen Criteria* Uni Eropa mendorong terlaksananya *Act on Elections to Regional Assemblies* (130/2000). Sehingga pada November 2000, Pemilu tingkat daerah berlangsung dengan memberikan pemerintah daerah kewenangan di bidang pendidikan, pembangunan daerah, budaya, pengawasan dan kerjasama dengan daerah lain di dalam maupun luar negeri

Uni Eropa kemudian membentuk *State Election Committee* (SEC) yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemilu dan konsultan di Republik Ceko. Kemudian SEC terdiri dari 10 anggota yaitu, dipimpin oleh *Minister of the Interior, Representatives of the Office of the President, The Czech Statistical Office* dan *Czech Ministries* serta *Accession Committee European Union*. SEC bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan dan pengawasan pemilu yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan partai politik dengan undang-undang pemilu, menampung keluhan dan mengontrol manajemen pemilu tingkat regional, menghitung hasil pemilu dan menyampaikannya ke parlemen Ceko serta mengkonfirmasi calon yang terpilih. Selain itu, *Accession Committee European Union* memiliki fungsi tambahan yaitu membentuk laporan akhir

pemilu dan melaporkan ke Komisi Eropa selama proses aksesasi berlangsung di Republik Ceko (<http://www.sussex.ac.uk>).

Peran Uni Eropa Sebagai Aktor

Fungsi Uni Eropa sebagai penyedia bantuan atau pelayanan teknis dalam bentuk bantuan keuangan melalui SAPARD di sektor pertanian dan *Phare program* di bidang politik. Peran Uni Eropa sebagai aktor terwujud dalam *EU Monitoring Accession Committee* yang berfungsi sebagai pengawas dan pembuat laporan. Peran maupun fungsi Uni Eropa ini memberikan pengaruh terhadap demokratisasi di Republik Ceko.

Bentuk bantuan Phare Program berfokus terhadap masalah hak asasi dan korupsi di Republik Ceko. Pada masalah kaum minoritas di Republik Ceko, Uni Eropa memberikan bantuan pada tahun 2000-2006 sebesar €1,5 juta.

Bantuan dana Uni Eropa juga bertujuan untuk mendukung organisasi-organisasi regional di Republik Ceko. Salah satu bentuk pelaksanaan *Phare program* yaitu dukungan pada *IQ Roma Servis (IQRS)* yang merupakan Organisasi Non-Pemerintah bertempat di Brno Republik Ceko yang bertujuan untuk mempromosikan anti diskriminasi minoritas Roma. Komisi Eropa membentuk proyek pendukung di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan perumahan. Proyek tersebut disalurkan melalui *IQ Roma Servis* yang mana juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah Ceko. Uni Eropa secara bertahap memberikan bantuan dana sebesar €30.000 - €50.000 untuk setiap proyek. Salah satu proyek yang sukses dilaksanakan adalah *Reviving Community Life*, proyek ini dibentuk untuk membantu peningkatan kualitas hidup kaum minoritas Roma di Republik Ceko yang berlangsung dari Februari 2004 sampai Januari 2005 (<http://ec.europa.eu>). Proyek ini

dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara pemerintahan Ceko, Uni Eropa, organisasi non-pemerintah Ceko dan masyarakat sipil.

Permasalahan korupsi di Republik Ceko cukup besar. Hal ini menjadi perhatian Uni Eropa untuk membantu permasalahan korupsi. Bantuan yang diberikan untuk proyek dalam rangka program pemberantasan korupsi baik melalui organisasi non-pemerintah ataupun organisasi pemerintah sebesar €36,14 juta. Stimulus terbesar diberikan kepada organisasi atau instansi independen yang memiliki visi dan misi sejalan dengan pemberantasan korupsi di Republik Ceko dikarenakan Uni Eropa ingin membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam memberantas korupsi. Jumlah keseluruhan dana *Phare* yang diberikan dalam rangka bantuan teknis program nasional Ceko sebesar €52,54 juta dengan jumlah presentase 13,87 persen. Dana sebesar €327,46 juta tidak terpakai dalam proyek nasional Ceko yang artinya alokasi dana tersebut diserahkan kembali kepada Komisi Eropa untuk diolah kembali.

Selanjutnya, dalam *The Multiannual Financing Agreement* bagian B, Pasal 7, Republik Ceko wajib membentuk komite pengawas dalam rangka mengawasi program SAPARD bersama Komisi Eropa (Cardwell 2004:396). Berdasarkan pasal tersebut Komisi Eropa meyarankan pembentukan *National Monitoring Committee* (NMC) di Republik Ceko yang mana pada 2 Agustus 2001 disetujui dan ditanda tangani oleh Menteri Pertanian, hal ini menjadi bentuk komitmen Republik Ceko dalam menjaga stabilitas pelaksanaan program SAPARD. *National Monitoring Committee* (NMC) program SAPARD terdiri dari 8 *Regional Monitoring Sub-committee* (RMS) pada tingkat daerah dan 25 anggota yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian Republik Ceko. Anggota NMC memiliki fungsi

untuk mengadakan pertemuan secara berkala yang dihadiri oleh Komisi Eropa sebagai pengamat dan konsultan. Fungsi dan tugas dari NMC ini adalah untuk mengatur pelaksanaan program SAPARD di Republik Ceko, menyetujui rencana program dan membuat laporan tahunan (Davidova 2006:74).

Komite Akses Uni Eropa merupakan salah satu bentuk komite pengawas bantuan dana Uni Eropa. Tujuan pengawasan lebih berfokus terhadap program-program yang telah didanai oleh Uni Eropa, seperti pengawasan program perlindungan minoritas di Republik Ceko (sosial dan HAM), program pembentukan badan kehakiman yang independen (politik) dan program kebijakan anti korupsi Republik Ceko.

Pengaruh Uni Eropa Dalam Demokrasi di Republik Ceko Pasca Akses.

Kemajuan di bidang politik berupa terlaksananya pemilihan umum parlemen (legislatif) di Republik Ceko, dapat terselenggara dengan adanya bantuan dana *Phare* yang dialokasikan sebesar 30 persen dan pengawasan pemilu oleh *State Election Commission* (SEC) serta hasil laporan yang dikeluarkan Komisi Uni Eropa melalui *EU Monitoring Accession Committee*.

Uni Eropa mempunyai peran penting dalam pemilu tahun 2006 ini. Contohnya adalah dalam penyelesaian perselisihan antara partai-partai di Republik Ceko tahun 2003, seperti *Civic Democrat* dan *Communist Party* yang pro-pasar dan anti kapitalis sedangkan *Social Democrat*, *Christian Democratic Union*, dan *Freedom Union* yang sangat mendukung integrasi pasar Uni Eropa. Uni Eropa dalam rangka menyelesaikan perselisihan pendapat antar partai-partai tersebut, Uni Eropa sebagai aktor yang memiliki *power* dan peran sebagai pengontrol menunda referendum

Republik Ceko dalam keanggotaan Uni Eropa, hal ini dilakukan sebagai jeda untuk refleksi para partai terhadap perselisihan pendapat.

Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara bersamaan sejalan dengan suksesnya Republik Ceko menyelesaikan aksesinya tahun 2004 dan menjadi anggota Uni Eropa secara resmi. Uni Eropa menjadi aktor yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur negara anggotanya yang bersifat tidak memaksa atau persuasif dan memberikan pengaruhnya melalui solusi-solusi yang diberikan.

Kesimpulan

Uni Eropa adalah aktor yang memfasilitasi transformasi proses demokrasi secara konsisten dan fokus dalam integrasi ekonomi dan politik di Eropa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi Eropa pada struktur domestik yaitu, pertama budaya komunis dan kualitas birokrasi mempengaruhi proses perubahan namun apabila birokrasi berfungsi dengan baik dan kuat maka transformasi dapat dilakukan dengan baik, kedua kapasitas untuk melaksanakan reformasi, ketiga kekuatan atau tekanan dari Uni Eropa, keempat dampak integrasi dalam struktur dalam negeri, kelima ketidaksesuaian antara struktur kelembagaan Uni Eropa dan Republik Ceko di tingkat domestik.

Pengaruh Uni Eropa pada proses perubahan di Republik Ceko sangat tinggi, hal ini didukung oleh inisiatif Republik Ceko untuk bergabung menjadi bagian dari anggota Uni Eropa. Keinginan Republik Ceko untuk menjadi anggota Uni Eropa mempercepat demokratisasi.

Persyaratan merupakan mekanisme yang digunakan Uni Eropa untuk memastikan kepatuhan atas kebijakan yang telah disepakati. Persyaratan Uni Eropa meningkatkan infrastruktur kelembagaan dan kapasitas legislatif. Di sisi lain

proses aksesinya juga memberikan pengaruh dalam bentuk sosialisasi terhadap calon negara-negara anggota.

REFERENSI :

- Buku**
- Asisusilo, Sutarjo, *Integrasi Ekonomi Eropa*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2006.
- Dam, Syamsumar, *Demokratisasi di Eropa Tengah dan Timur Pasca Komunis*, LIPI Press, Jakarta, 2002.
- Fawn, Rick, *The Czech Republic: a Nation of Velvet*, Taylor&francis Press, Uk, 2005.
- Kavan, Zdenek, *The Velvet Revolution: Czechoslovakia 1988-1991*, Westview Press, New York, 1992.
- Jurnal**
- Grabbe, "How Does Europeanization Affect CEE Governance? Conditionally, Diffusion and Diversity", *Journal of European Public Policy*, vol.8, no. 6, hal 1013.
- Klima, "Consolidation and Stabilization of The Party System in The Czech Republic", *Political Studies*, Vol.46,1998, hal. 492-510.
- Laplant, James, "Decentralization in The Czech Republic: The European Union, Political Parties and Creation of Regional Assemblies", *The Journal of Federalisme*, Vol.1, no.34,2004, hal 38 39.
- Pridham, "European Union Accession Dynamics and Democratization in Central and Eastern Europe: Dast and Future Perspectives", *Government and opposition*, Vol.41, No.3, 2006, hal. 373-450.
- Internet**
- Brusis, Martin, "Negotiating EU Accession: Policy Approaches of Advance Candidate Countries From Central and Eastern Europe", http://epub.ub.unimuenchen.de/13877/1/brusis_13877.pdf diakses pada 4 Mei 2015.
- Cunderlikova, Monika, "The European Union Phare Programme", http://www.nbs.sk/img/Documents/BIATEC/BIA01_07/13.pdf, diakses pada tanggal 16 Februari 2015.
- Gal, Konga, "The Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities in Central Europe", <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinorities8en.pdf>, diakses pada 30 Mei 2015.
- Illner, Michal, "The Regional Aspect of Post-Communist Transformation In The Czech Republic", <http://sreview.soc.cas.cz/uploads/.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015.
- Marktler, Tanja, "The Power Of Copenhagen Criteria", <http://www.cyelp.com/index.php/cyelp/article/viewFile/23/22>, diakses pada tanggal 16 Februari 2015.
- Verhengen, Gunter, "The Czech Republic Entering The European Union", <http://ieconf2000.euweb.cz/Cervenanska%20EUpaper.doc>, diakses pada 4 Mei 2015.